KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN FISKAL REGIONAL

TRIWULAN I 2019

Penyusun :
Penanggung Jawab : Midden Sihombing | Ketua Tim : Mustriyono | Tim Penyusun : Sri Kuncoro Herlambang | Moch. Ichsan Arditriansyah | Maharrucha Zakka | Fahmi Mustafa

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
Provinsi Kalimantan Utara

DAFTAR ISI

I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS INDIKATOR EKONOMI REGIONAL 1

A. Produk Domestik Regional Bruto 1

B. Inflasi 3

C. Indikator Kesejahteraan 4

II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN 5

A. Pendapatan Negara 5

B. Belanja Negara 8

C. Prognosis Realisasi APBN 12

III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD 13

A. Pendapatan Daerah 14

B. Belanja Daerah 18

C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 19

IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD) 20

A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian 20

B. Pendapatan Konsolidasian 20

C. Belanja Konsolidasian 22

D. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 24

V. BERITA/ISU FISKAL TERPILIH 25

I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS INDIKATOR EKONOMI REGIONAL

A. Produk Domestik Regional Bruto

Grafik PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

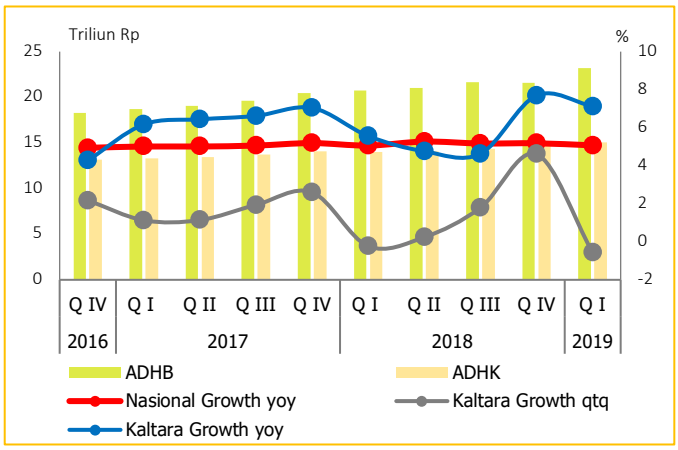

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Pada triwulan I 2019 perekonomian Kalimantan Utara tumbuh sebesar 7,13% (yoy), tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2017 dan 2018 yang tumbuh masing-masing sebesar 6,17% dan 5,56%. Bila dibandingkan dengan periode triwulan IV 2018 (qtq) kinerja perekonomian Kalimantan Utara pada triwulan I mengalami kontraksi sebesar 0,56%. Tingkat pertumbuhan (yoy) yang tercatat pada periode pelaporan menghasilkan angka Nominal PDRB berdasarkan ADHB kembali meningkat menjadi sebesar Rp23,16 triliun dan berdasarkan ADHK tercatat sebesar sebesar Rp15,06 triliun.

Distribusi PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan

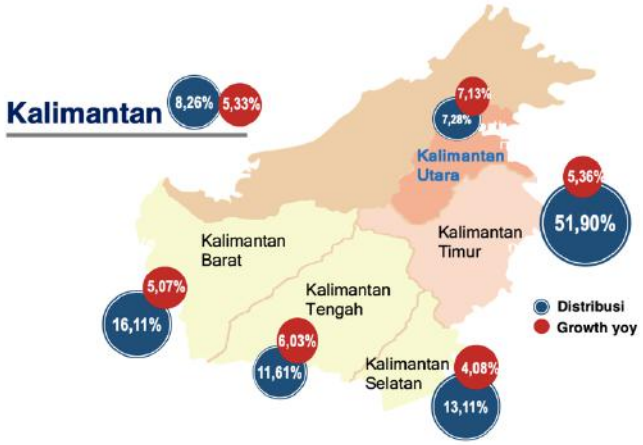

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Secara spasial di Pulau Kalimantan, Kalimantan Utara berhasil mencatatkan tingkat pertumbuhan (yoy) yang tertinggi, namun kontribusinya terhadap perekonomian di regional Kalimantan masih menjadi yang terkecil sebesar 7,28%.

Dari sisi lapangan usaha, struktur ekonomi diprovinsi termuda ini tidak mengalami perubahan dari periode-periode sebelumnya, dimana lapangan usaha pertambangan dan penggalian masih menjadi penggerak utama perekonomian dengan andil sebesar 27,33 persen terhadap total PDRB. Ditinjau dari tingkat pertumbuhannya, semua sektor mengalami pertumbuhan, dimana lapangan usaha Jasa Lainnya mencatatkan tingkat pertumbuhan yang tertinggi sebesar 9,99%, diikuti oleh lapangan

usaha Administrasi Pemerintahan sebesar 14,45% serta lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 9,79%.

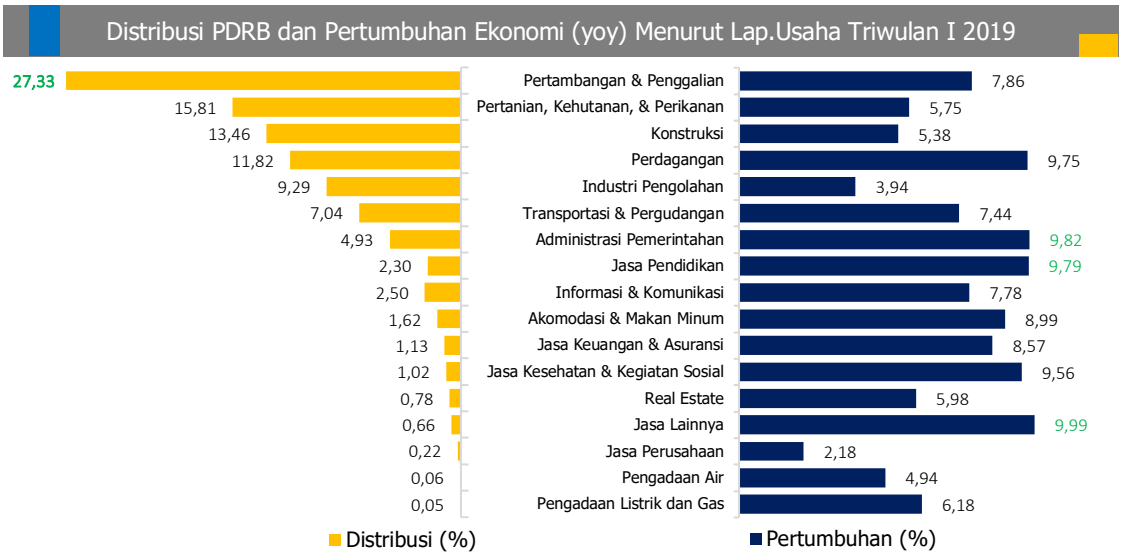

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Meski tetap bertumbuh, 3 (tiga) lapangan usaha yang memiliki *share* terbesar terhadap ekonomi Kalimantan Utara mengalami perlambatan kinerja dibandingkan triwulan sebelumnya (yoy). Pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, perlambatan kinerja disebabkan penurunan produksi batubara dan minyak, sedangkan turunnya produksi padi dan kayu menjadi penyebab perlambatan pertumbuhan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Adapun perlambatan pertumbuhan pada lapangan usaha Konstruksi, dipicu oleh kondisi awal tahun anggaran dimana sebagian besar proyek Infrastruktur Pemerintah belum terealisasi.

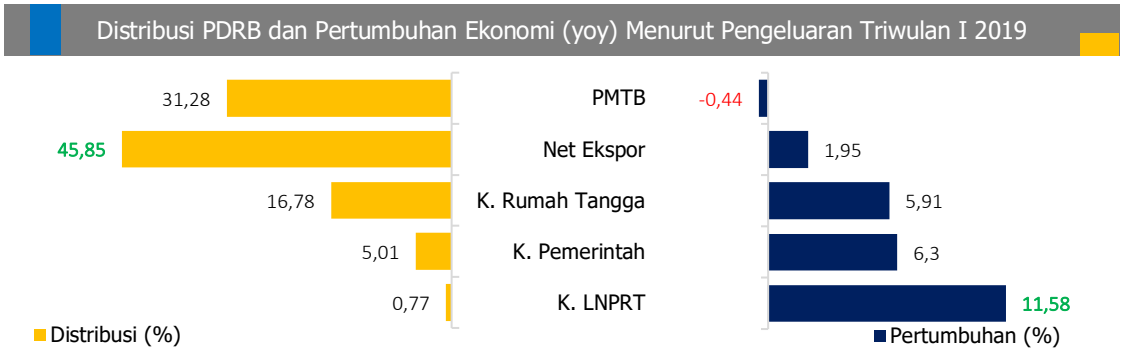

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Jika dilihat menurut pengeluarannya, struktur PDRB Kalimantan Utara pada periode triwulan I 2019 ditopang secara dominan oleh kinerja Net Ekspor yang mencapai 45,85 persen dari total PDRB. Peningkatan kinerja Net Ekspor dipicu oleh aktivitas ekspor

antar daerah yang meningkat meskipun disaat yang bersamaan terjadi penurunan ekspor Luar Negeri karena penurunan produksi berbagai komoditas utama.

B. Inflasi

Grafik Tingkat Inflasi Kaltara Nasional Triwulan I 2019

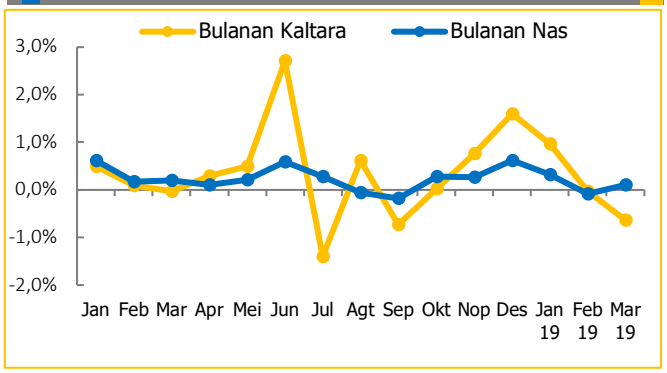

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Setelah mengalami tren kenaikan pada triwulan sebelumnya, *tingkat inflasi Kalimantan Utara sepanjang triwulan I 2019 mengalami kondisi yang berkebalikan*. Pada bulan Januari, terjadi inflasi di Kalimantan Utara sebesar 0,96%. Tingkat inflasi yang tercatat lebih tinggi dari inflasi nasional ini dipengaruhi oleh peningkatan harga pada kelompok bahan makanan dengan andil terbesar terhadap inflasi yang mencapai 0,59%. Andil inflasi dari kelompok bahan makanan didorong oleh gangguan ketersediaan pasokan terutama pada komoditas daging ayam ras, bawang merah, dan tomat. Selain kelompok bahan makanan, angkutan transportasi udara dengan andil terhadap inflasi yang mencapai 0,27% turut berkontribusi besar atas terjadinya inflasi di Kalimantan Utara

Sejalan dengan kondisi nasional, pada bulan Februari 2019 di Kalimantan Utara juga terjadi deflasi yang tercatat sebesar -0,03%. Terjadinya deflasi, secara dominan dipengaruhi oleh penurunan indeks harga pada kelompok Bahan Makanan sebesar -2,35% dan kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar sebesar -0,11% dan dengan andil terhadap deflasi masing-masing sebesar -0,631% dan -0,31%. Hal berkebalikan terjadi pada kelompok Transportasi dan Komunikasi dimana pada periode pelaporan mengalami kenaikan indeks harga sebesar 4,40% yang masih dipicu oleh kenaikan harga tiket transportasi udara di awal triwulan I 2019.

Meskipun ditingkat nasional pada akhir periode laporan atau selama bulan Maret 2018 mengalami inflasi, indeks harga di Kalimantan Utara kembali mencatatkan penurunan atau mengalami deflasi sebesar -0,63%. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil dominan terhadap deflasi berasal dari kelompok Bahan Makanan sebesar -0,24%, disusul kemudian kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan dengan andil sebesar -0,454%. Meredanya tekanan inflasi kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan serta kelompok Bahan Makanan yang merupakan komoditas strategis

dalam mempengaruhi inflasi mengindikasikan langkah-langkah yang telah dilakukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kalimantan Utara tepat sasaran.

Tingkat Inflasi tahun kalender Kalimantan Utara sampai dengan periode pelaporan tercatat sebesar 0,30% sementara Inflasi tahun ke tahun yang tercatat hingga Maret 2019 sebesar 4,74%, masih berada jauh dibawah target inflasi tahun 2019 yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara sebesar 6,33 persen.

Andil Inflasi Per Kelompok Pengeluaran Triwulan I 2019 (%)

Kelompok Pengeluaran	Jan	Feb	Mar	
Bahan Makanan	0,59	-0,63	-0,248	INFLASI TAHUN KALENDER
Makanan & Minuman, Rokok & Tembakau	0,13	0,009	0,038	
Perumahan, Air, Listrik, Gas & BB	-0,07	-0,03	0,020	
Sandang	0,009	0,003	0,003	
Kesehatan	0,02	0,002	0,015	0,30
Pendidikan, Rekreasi, & Olhraga	0,003	0,000	0,000	
Transportasi & Komunikasi	0,27	0,61	-0,454	
Inflasi (mtm)	*0,96*	*-0,03*	*-0,627*	

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

C. Indikator Kesejahteraan

Grafik Perkembangan Tingkat Pengangguran (%)

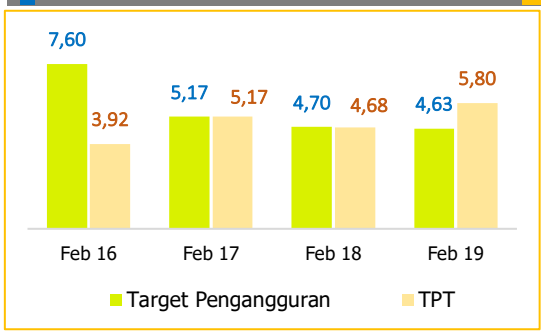

Sumber: BPS & Provinsi Kalimantan Utara

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) regional Kaltara pada bulan Februari 2019 tercatat sebesar 5,80% atau sekitar 20.681 dari 356.282 orang angkatan kerja. Angka TPT ini tercatat mengalami penurunan dibandingkan periode Februari 2018 dan masih jauh dibawah target pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran tahun 2019 sebesar 4,63%. TPT Kaltara periode ini juga tercatat rendah dari capaian TPT Nasional yang tercatat sebesar 5,01 persen.

II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Tabel Pagu dan Realisasi APBN Triwulan I 2018 -2019 (Miliar Rp)

URAIAN	T.A. 2018			T.A. 2019		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
A. Pendapatan dan Hibah	***2,631.4***	***436.9***	***16.6%***	***2,530.8***	***596.0***	***23.5%***
I. Penerimaan Dalam Negeri	2,631.4	436.9	16.6%	2,530.8	596.0	23.5%
1. Penerimaan Perpajakan	*2,490.2*	*363.0*	*14.6%*	*2,384.8*	*546.1*	*22.9%*
a. Pajak Dalam Negeri	2,474.1	351.7	14.2%	2,328.7	536.3	23.0%
b. Pajak Perdagangan Int.	16.1	11.3	70.5%	56.1	9.9	17.6%
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	*141.2*	*73.9*	*52.3%*	*146.0*	*49.9*	*34.1%*
a. PNBP Lainnya	137.2	67.3	49.0%	99.4	45.9	46.2%
b. Pendapatan BLU	4.0	6.6	165.3%	46.7	4.0	8.5%
B. Belanja Negara	***9,728.2***	***4,146.8***	***42.6%***	***10,585.8***	***2,039.3***	***19.3%***
I. Belanja Pemerintah Pusat	**3,460.6**	**341.8**	**9.9%**	**3,733.0**	**402.3**	**10.8%**
1. Belanja Pegawai	655.2	115.1	17.6%	793.3	138.5	17.5%
2. Belanja Barang	1,107.5	101.0	9.1%	1,152.8	149.2	12.9%
3. Belanja Modal	1,691.6	125.6	7.4%	1,782.0	114.6	6.4%
4. Bantuan Sosial	6.3	-	0.0%	5.1	-	0.0%
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	**6,339.8**	**3,163.2**	**49.9%**	**6,852.7**	**1,636.9**	**23.9%**
1. Transfer ke Daerah	5,957.4	1,487.1	25.0%	6,389.5	1,590.7	24.9%
a. Dana Bagi Hasil	1,127.4	193.8	17.2%	1,405.6	240.4	17.1%
i. Dana Bagi Hasil Pajak	387.2	58.2	15.0%	413.6	57.8	14.0%
ii. Dana Bagi Hasil SDA	740.2	135.6	18.3%	992.0	182.6	18.4%
b. Dana Alokasi Umum	3,709.6	1,236.5	33.3%	3,857.3	1,281.5	33.2%
c. DAK Fisik	656.2	-	0.0%	665.3	-	0.0%
d. Dana Insentif Daerah	69.5	-	0.0%	-	-	
f. DAK Non Fisik	394.7	56.7	14.4%	461.3	68.9	14.9%
2. Dana Desa	*387.6*	*77.5*	*20.0%*	*463.3*	*46.2*	*10.0%*
D. Surplus/Defisit Anggaran	***(7,097)***	***(3,710)***	***52.3%***	***(8,055)***	***(1,443)***	***17.9%***

Sumber : Kanwil DJP Kaltim, Kanwil DJBC Kalbagtim, OM SPAN dan SIMTRADA, diolah.

Realisasi pendapatan di triwulan I 2019 *secara persentase terhadap pagu maupun nominalnya meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.* Adapun target pendapatan tahun ini turun dari Rp2,63 triliun di tahun 2018 menjadi Rp2,53 triliun di tahun 2019. Dari sisi belanja, *tingkat persentase realisasi terhadap pagu tercatat sebesar 23,5%, meningkat bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar 16,6%*.

A. Pendapatan Negara

1. Penerimaan Perpajakan

Grafik Realisasi Penerimaan Pajak Triwulan I 2019

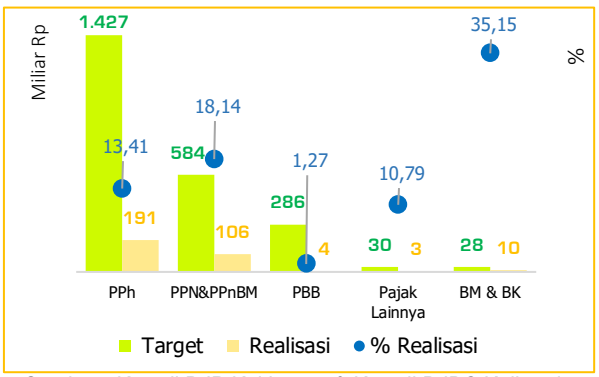

Sumber : Kanwil DJP Kaltimtara & Kanwil DJBC Kalbagtim

Sampai dengan akhir periode pelaporan, realisasi penerimaan pajak di regional Kalimantan Utara tercatat Rp536,3 miliar, terjadi peningkatan dibandingkan penerimaan di periode yang sama tahun 2018 yang hanya mencapai Rp351,7 miliar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018, capaian

penerimaan perpajakan juga mengalami peningkatan secara persentase terhadap target dari sebesar 14,20% meningkat menjadi 22,9% pada triwulan I tahun 2019. Peningkatan capaian nominal ini tentunya menggembirakan ditengah menurunnya target penerimaan perpajakan tahun 2019 sebesar Rp105,4 miliar dibandingkan target tahun lalu. PPh dan PPN masih menjadi kontributor utama realisasi penerimaan pajak. Sampai dengan akhir periode laporan, penerimaan PPh mencapai 13,41% dari target atau setara Rp191,4 miliar. Realisasi PPN mencapai 23,9% atau sebesar Rp105,9 miliar. Persentase realisasi penerimaan pajak tertinggi tercatat pada jenis Pajak Perdagangan Internasional yaitu Bea Masuk dan Bea Keluar yang berhasil tercapai sebesar 35,3% dari target.

Jika dilihat tren realisasi triwulan I dalam kurun waktu 2017 - 2019, maka secara

Grafik Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Triwulan I Tahun 2017-2019 (Miliar Rp)

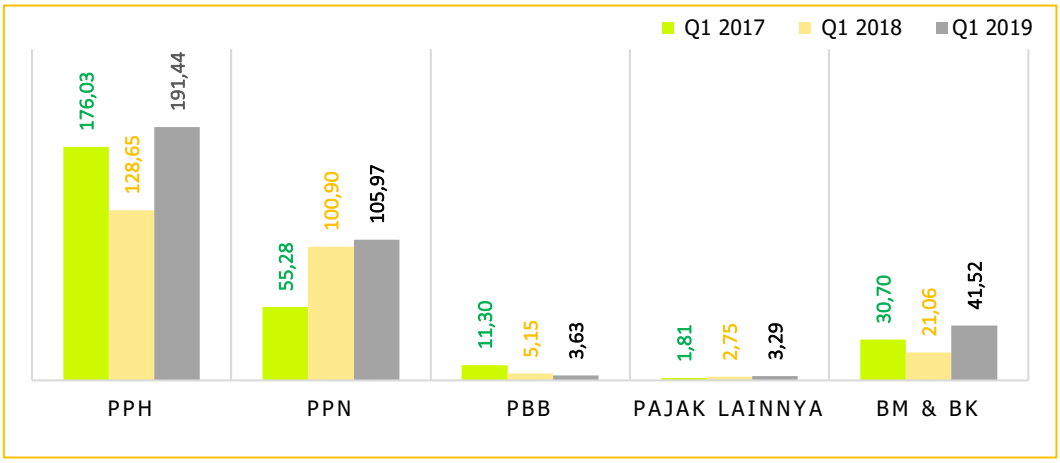

Sumber : Kanwil DJP Kaltim Kaltara dan Kanwil DJBC Kalbagtim

umum capaian pada tahun 2019 menunjukkan sinyal yang sangat menggembirakan karena terjadi peningkatan hampir dibeberapa jenis pajak mengalami peningkatan, PPh yang menjadi kontributor penerimaan pajak terbesar. Di tahun 2019 hanya PBB mengalami penurunan, dan dilihat dari tren 3 tahun terakhir selalu menurun pada tiap tahunnya.

Perhitungan total pajak tidak sama dengan yang disajikan dalam total pajak dalam negeri, karena dalam penyajian pajak perdaerah, perjenis pajak KPP sebagai penyedia hanya mencatat pajak yang berada dalam wilayah kerja KPP tersebut, tetapi angka yang tersaji dalam Pajak dalam Negeri merupakan total dari seluruh penerimaan pajak yang disetorkan di regional Kalimantan Utara.

a) Pajak Penghasilan

Realisasi penerimaan PPh pada triwulan I tahun 2019 tercatat Rp404,92 miliar (*I account* triwulan I 2019), naik cukup signifikan sebesar Rp136,1 miliar dari realisasi triwulan I tahun 2018 yang hanya sebesar 268,72 miliar. Peningkatan in terlihat di setiap daerah, Kontributor terbesar PPh adalah Kota Tarakan sebesar Rp87,26,4 miliar, Kabupaten Nunukan sebesar Rp43,9 miliar, dan Kabupaten Bulungan sebesar Rp43,9 miliar. Capaian realisasi yang berasal dari ketiga Kabupaten/Kota ini menyumbang Rp166,53 miliar atau hampir 86,99% dari total realisasi PPh.

b) Pajak Pertambahan Nilai

Realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada triwulan I tahun 2019 mencapai Rp120,75 miliar, mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar Rp26,99 miliar atau sebesar 22,35% dari realisasi periode yang sama tahun lalu. Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan merupakan 2 wilayah yang menjadi kontributor terbesar yang ditahun sebelumnya Kab. Nunukan yang menempati urutan kedua, besaram di ttriwulan 1 2019 ini masing-masing sebesar Rp65,56 miliar dan Rp23,98 miliar.

Realisasi yang tercatat sampai dengan tanggal 31 Maret 2018, termasuk di dalamnya realisasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp63,80 juta.

c) Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai

Realisasi penerimaan Bea dan Cukai pada triwulan I tahun 2019 tercatat sebesar Rp9,85 miliar atau 35,17% dari target tahun 2019. Penerimaan tersebut terdiri dari Bea Masuk sebesar Rp7,54 miliar dan Bea Keluar senilai Rp2,31 miliar. Capaian realisasi ini baik secara nominal maupun persen realisasi terhadap target mengalami penurunan jika dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Dan penghasilan tersebut dicatatkan pada 2 daerah saja di Kalimantan Utara yaitu Kota Tarakan dan Kab. Nunukan.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi PNBP di triwulan I tahun 2019 ini mencapai Rp49,85 miliar, meningkat 14,57% atau sebesar Rp6,33 miliar dari realisasi PNBP periode yang sama tahun 2018 sebesar Rp43,52 miliar. PNBP yang tercatat di wilayah Kalimantan Utara hanya terdiri dari 2 jenis, yaitu PNBP Lainnya dan PNBP Badan Layanan Umum. Sedangkan jenis PNBP Sumber Daya Alam dan PNBP Laba BUMN seluruhnya disetorkan dan tercatat secara terpusat

Grafik Struktur Penyumbang PNBP Lainnya s.d. Triwulan I 2019

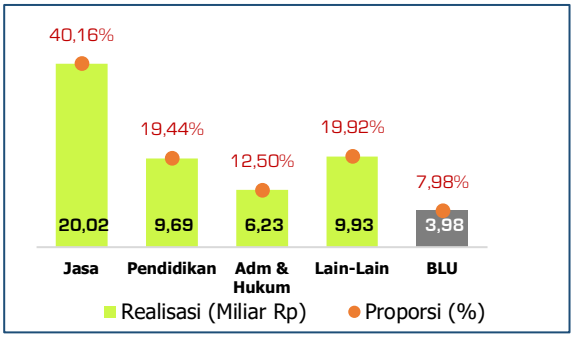

Sumber : OMSPAN, diunduh 7 Mei 2018

Mayoritas PNBP Lainnya bersumber dari Pendapatan Jasa yang sampai dengan 31 Maret 2018 dapat terealisasi senilai Rp20,02 miliar mencatatkan kontribusi sebesar 40,16% realisasi PNBP. PNBP lain-lain sebesar Rp9,93 miliar merupkan gabungan dari pendapatan bunga, penjualan BMN, denda, kesehatan dan lain-lain.

Selain itu, pada triwulan I tahun 2019, sudah terdapat pengesahan transaksi BLU yang ditandai dengan adanya realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum pada Bandar Udara Juwata senilai Rp3,98 miliar.

B. Belanja Negara

1. Belanja Pemerintah Pusat

Grafik Persentase Realisasi Belanja s.d. Triwulan I Tahun 2019

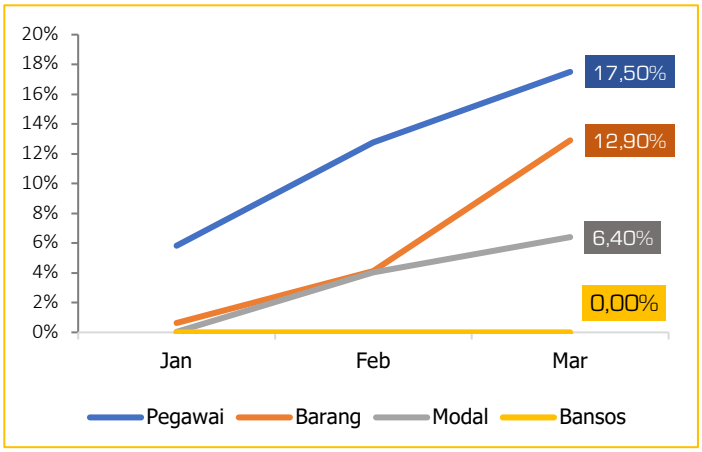

Sumber : Data Realisasi Belanja per wilayah, OM SPAN

Realisasi belanja sampai dengan 31 Maret 2018 secara keseluruhan masih berada pada level 10,8%. Kinerja realisasi belanja tercatat hampir sama dengan periode yang sama di tahun 2018 kecuali pada jenis belanja pegawai sedikit mengalami penurunan. Sampai dengan 31 Maret 2019, belanja pegawai yang sudah direalisasikan mencapai 17,5% dari pagu. Tingginya realisasi belanja pegawai tersebut sesuai dengan karakter belanja pegawai yang relatif konstan setiap bulannya serta relatif tidak memerlukan proses administrasi pencairan yang rumit

Posisi kedua tercatat pada belanja barang yang sampai dengan akhir periode pelaporan mencapai 12,9%. Capaian ini juga relatif dipengaruhi oleh karakter

pencairan belanja barang khususnya untuk membiayai kebutuhan operasional kantor sejak awal tahun anggaran.

Adapun belanja modal mencatatkan realisasi yang kurang menggembirakan, yaitu hanya sebesar 6,4% malah turun dibandingkan tahun 2018 sebesar 7,43%. Dengan peningkatan alokasi sebesar Rp90 miliar dari alokasi tahun 2018, capaian realisasi pada periode ini tercatat lebih rendah jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2018. Masih rendahnya belanja modal dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama karena harus melalui proses administrasi dan proses lelang penyedia barang/jasa.

a) Belanja Barang

Grafik Realisasi Belanja Barang per Klasifikasi Belanja s.d Triwulan I 2019

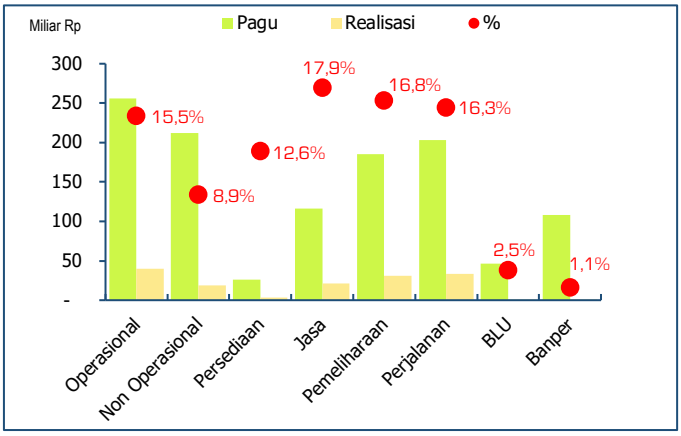

Sumber : Diolah dari data Monev PA

Pagu terbesar belanja barang diperuntukkan untuk belanja operasional yang mencapai Rp256,1 miliar, dengan angka realisasi sebesar Rp39,78 miliar atau 15,54% dari pagu. Belanja barang dengan alokasi paling kecil adalah belanja barang Persediaan yang hanya sebesar Rp25,9 miliar.

Belanja perjalanan dinas yang dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas ASN tercatat sebesar Rp203,2 miliar, lebih tinggi dibandingkan alokasi Belanja Pemeliharaan dan Belanja Bantuan Pemerintah.

b) Belanja Bantuan Pemerintah

Dana bantuan pemerintah yang dialokasikan pada tahun 2019 ini disalurkan melalui 12 Kementerian/Lembaga (K/L). sebesar Rp107,9miliar Alokasi terbesar berasal dari Satker lingkup Kementerian PU-Pera yang mencapai Rp77,7 miliar, disusul kemudian satker lingkup Kementerian Pertanian sebesar Rp19,0miliar dan satker lingkup Kementerian Desa PDTT sebesar Rp7,4 miliar. Hingga akhir triwulan I tahun 2019, realisasi belanja bantuan pemerintah baru mencapai Rp1,1 miliar atau sebesar 1,05% dari pagu. Tingkat penyerapan tertinggi berasal dari penyaluran Bantuan yang dikelola satker lingkup Kementerian Pendidikan yang telah mencapai 33,3% dari pagu atau sebesar Rp125 juta. Apabila dilihat dari

nominal, capaian tertinggi berasal dari Kementerian Pertanian sebesar Rp549 juta, sedangkan penyaluran Bantuan yang berada dalam pengelolaan satker lingkup Kementerian PU-Pera dan Kementerian Pertanian yang merupakan 2 alokasi terbesar, masing-masing baru tercapai sebesar 0% dan 2,89%.

c) Belanja Modal

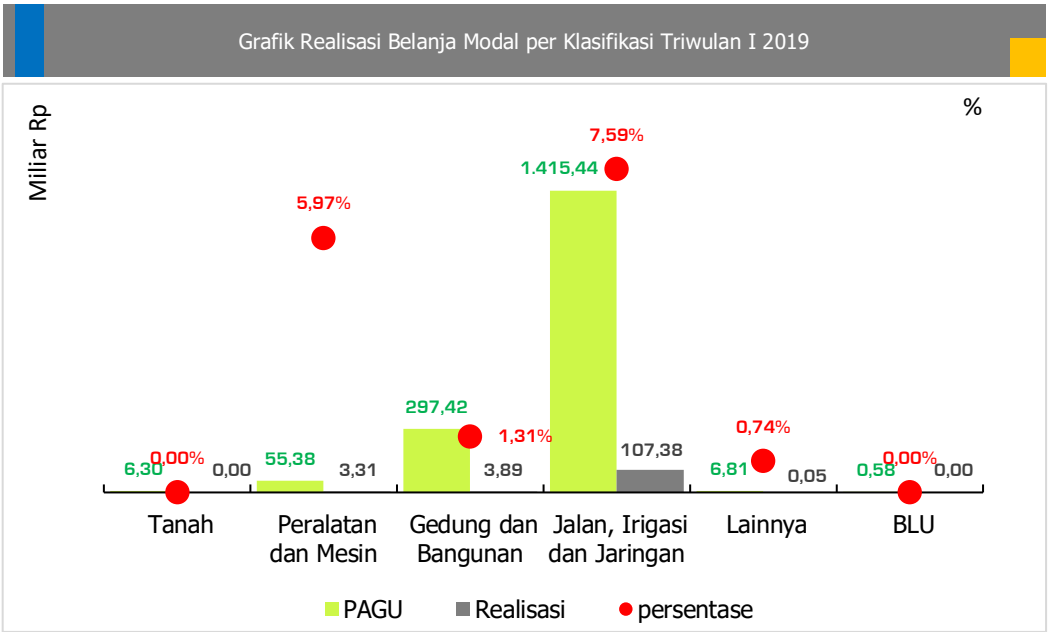

Sumber : Monev PA (olah data) diunduh tanggan 7 Mei 2019

Belanja modal terbesar dialokasikan untuk keperluan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang mencapai Rp1,41 triliun atau 79,43% dari total Belanja Modal. Sampai dengan akhir periode laporan, realisasi belanja ini mencapai Rp107,38 miliar atau 7,59% dari pagu.

Alokasi dana yang sangat besar tersebut sebagian besar atau mencapai 67,41% merupakan program Penyelenggaran Jalan yang dilaksanakan oleh satker Pelaksanaan Jalan Perbatasan Kalimantan Utara dan Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Utara. Program pembangunan jalan khususnya di wilayah perbatasan terus dilanjutkan karena merupakan fokus perhatian dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai salah satu pencanangan program pembanguna Indonesia dari titik terluar.

Alokasi belanja modal terbesar kedua adalah Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang mencapai Rp297,41 miliar. Sampai dengan akhir triwulan I 2019 realisasi belanja ini baru sebesar Rp3,88 miliar atau 1,31% dari pagu. Realisasi yang rendah disebabkan karena di triwulan I ini sebagian besar pekerjaan-pekerjaan fisik dan bersifat kontraktual masih dalam proses pemilihan penyedia

barang dan jasa. Alokasi untuk Gedung dan Bangunan diprioritaskan karena sebagai penunjang pelayanan publik oleh kantor-kantor vertikal yang berada di Prov. Kaltara yang notabene merupakan provinsi termuda yang masih terus membangun.

2. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Grafik Penyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa s.d 31 Maret 2019

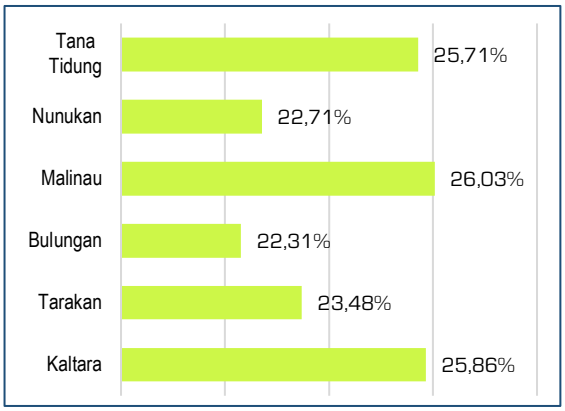

Sumber : Aplikasi SIMTRADA DJPK dan OM SPAN, diunduh 7 Mei 2019

Sampai dengan tanggal 31 Maret 2019 secara rata-rata realisasi penyaluran dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) telah mencapai 24,35%. Realisasi tertinggi tercatat ke Kabupaten Malinau sebesar 26,03% sedangkan realisasi terendah berada di Kabupaten Bulungan sebesar 22,31%.

3. Pengelolaan BLU

Masih seperti Tahun kemarin sampai akhir triwulan I tahun 2019, Bandara Udara Juwata Tarakan merupakan satu-satunya satuan kerja yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU) di wilayah Kalimantan Utara.

Grafik Pendapatan dan Belanja BLU Bandara Juwata s.d Triwulan I 2019 (Juta Rp)

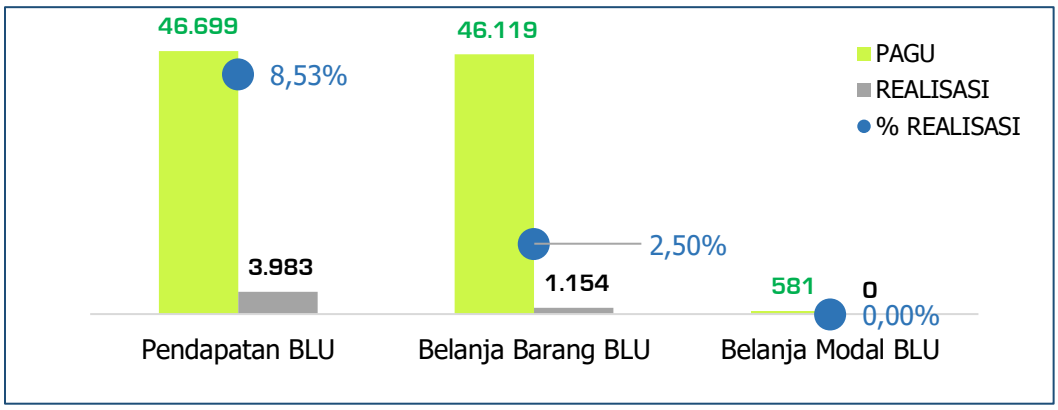

Sumber : Aplikasi E-Rekon LK dan Monev PA

Berdasarkan pengesahan pendapatan dan belanja sampai dengan akhir triwulan I tahun 2019, realisasi pendapatan BLU tercatat sebesar 8,53% dari target atau senilai Rp3,98 miliar. Mayoritas dari realisasi tersebut bersumber dari Pendapatan Jasa Bandar Udara yang mencapai Rp3,24 miliar sedangkan

sisanya merupakan Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU , Kepelabuhan dan Kenavigasian. Akan tetapi dari sisi belanja, sedangkan untuk belanja BLU baru mengesahkan sebesar Rp1,15 miliar atau sebesar 2,55% dari pagu Belanja.

C. Prognosis Realisasi APBN

Kebijakan menjadi salah satu pertimbangan dalam perhitungan proyeksi realisasi pendapatan dan belanja. Pada Tahun Anggaran 2019 ini kebijakan APBN mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat yang menfokuskan pada pengembangan Sumber Daya Manusia pada TA 2019 setalah sebelumnya berfokus pada pembangunan infrasturktur. Dengan adanya skala prioritas baru ini maka diharapkan alokasi Belanja pada APBN dapat terserap lebih baik serta dengan penggunaan yang lebih tepat sasaran.

Pemberlakuan penilaian kinerja pelaksanaana anggaran dengan munculnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada masing-masing Kementerian dan Lembaga akan memicu diharapkan dapat menjadi stimulant bagi setiap Pengguna Anggaran untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan anggaran secara lebih tepat, akurat dan akuntabel.

Disamping itu, untuk memperoleh prognosis yang relatif mendekati kenyataan, maka beberapa hal lain juga telah dipertimbangkan dan diperhitungkan, antara lain :

1) Data historis/statistik capaian realisasi dan tren penerimaan.
2) Instruksi langkah-langkah strategis pelaksanaan APBN 2019.
3) Perkiraan realisasi belanja berdasarkan data ADK kontrak yang telah diterima KPPN.
4) Data kontrak / rencana kegiatan DAK Fisik yang dilaporkan ke KPPN.
5) Kenaikan/penurunan pagu dana Transfer ke Daerah pada APBN-P (potensi peningkatan Dana Bagi Hasil SDA seiring peningkatan harga/volume komoditas tambang, penurunan DAU akibat penurunan target penerimaan perpajakan dan tambahan alokasi DAK Fisik).

Tabel Perkiraan Realisasi APBN s.d. Triwulan IV Tahun 2019

URAIAN	PAGU (Miliar Rp)	Realisasi s.d. Triwulan I 2019		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV 2019	
		Rp (Miliar Rp)	% Real thd PAGU	Rp (Miliar Rp)	% Real thd PAGU
Pendapatan Negara	2.530,76	596,02	23,53%	2.125,83	84%
Belanja Negara	10.585,81	2.039,36	19,32%	9.950,66	94%
Surplus/Defisit	*(8.055,05)*	*(1.443,34)*		*(7.824,82)*	

III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Hingga akhir Triwulan I 2019 *pendapatan daerah yang terealisasi secara agregat mencapai Rp1,7triliun atau 21,2 persen dari target*. Tingkat realisasi pada periode ini, secara persentase mengalami penurunan dari periode yang sama tahun 2018 yang tercatat sebesar 22,2 persen.

Pada periode yang sama, *alokasi belanja dan transfer seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Utara terealisasi sebesar Rp0,72 triliun atau 8,3 persen dari pagu*. Capaian ini lebih buruk dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang terealisasi 8,9 persen.

Tabel Realisasi APBD Lingkup Provinsi Kalimantan Utara Triwulan I 2018-2019 (Miliar Rp)

URAIAN	T.A. 2018			T.A. 2019			%↑↓ Nominal Realisasi
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	
PENDAPATAN	7.323,3	1.622,3	22,2%	8.193,8	1.739,4	21,2%	7,2%
PAD	851,2	105,0	12,3%	964,3	80,3	8,3%	-23,5%
Pajak daerah	433,8	88,3	20,3%	506,7	60,9	12,0%	-31,0%
Retribusi daerah	48,2	6,3	13,1%	52,3	4,9	9,4%	-21,7%
Hasil Pengelolaan KD yang dipisahkan	48,7	-	0,0%	59,2	-	0,0%	-
Lain-lain PAD yang sah	320,6	10,4	3,2%	346,2	14,5	4,2%	39,5%
Pendapatan Transfer	6.431,3	1.515,9	23,6%	6.926,4	1.657,5	23,9%	9,3%
Transfer Pemerintah Pusat	6.147,9	1.515,9	24,7%	6.722,4	1.635,6	24,3%	7,9%
Dana Bagi Hasil Pajak	452,6	71,7	15,8%	621,3	56,4	9,1%	-21,4%
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	774,9	132,3	17,1%	825,0	182,6	22,1%	38,0%
Dana Alokasi Umum	3.709,6	1.197,9	32,3%	3.857,3	1.281,5	33,2%	7,0%
Dana Alokasi Khusus	955,8	83,3	8,7%	1.106,4	68,9	6,2%	-17,4%
Dana Insentif Daerah	255,0	30,6	12,0%	312,4	-	0,0%	-100,0%
Dana Desa	-	-		-	46,2	-	-
Transfer Pemerintah Provinsi	169,0	-	0,0%	189,5	21,9	11,6%	-
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	169,0	-	0,0%	189,5	21,5	11,3%	-
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-		-	0,4		-
Transfer Bantuan Keuangan	114,3	-	0,0%	14,5	-	0,0%	-
Lain-lain Pendapatan yang sah	40,8	1,4	3,6%	303,0	1,6	0,5%	8,5%
Pendapatan Hibah	5,5	0,3	5,7%	61,9	0,2	0,3%	-48,8%
Pendapatan Dana Darurat	-	-		190,9	-	0,0%	-
Pendapatan Lainnya	35,2	1,1	3,2%	50,2	1,4	2,8%	24,5%
BELANJA	8.113,0	714,3	8,8%	7.976,8	665,8	8,3%	-6,8%
Belanja Operasi	5.660,2	619,1	10,9%	5.781,7	635,9	11,0%	2,7%
Belanja Pegawai	2.835,1	433,7	15,3%	2.625,0	433,4	16,5%	-0,1%
Belanja Barang	1.992,1	148,1	7,4%	2.465,7	158,3	6,4%	6,9%
Belanja Bunga	7,2	-	0,0%	19,0	-	0,0%	-
Belanja Subsidi	26,8	-	0,0%	35,9	3,3	9,1%	-
Belanja Hibah	441,8	37,3	8,4%	321,8	39,0	12,1%	4,8%
Belanja Bantuan Sosial	15,7	-	0,0%	10,0	1,9	18,7%	-
Belanja Bantuan Keuangan	341,6	-	*0,0%*	304,3	-	*0,0%*	-
Belanja Modal	2.438,9	95,1	3,9%	2.179,9	29,8	1,4%	-68,6%
Belanja tidak terduga	14,0	-	0,0%	15,3	-	0,0%	-
Transfer Pemprov	534,7	51,3	9,6%	710,3	56,5	8,0%	10,1%
BELANJA dan TRANSFER	8.647,7	765,6	8,9%	8.687,2	722,3	8,3%	-5,7%
SURPLUS/DEFISIT	(1.324,4)	856,7	-64,7%	(493,4)	1.017,1	-206,1%	18,7%

Sumber : BPKAD se-Kaltara (diolah)

A. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

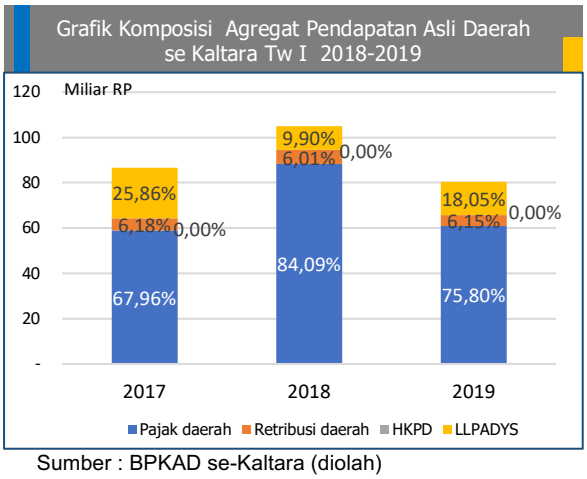

Sumber : BPKAD se-Kaltara (diolah)

Pada Triwulan I 2019, realisasi PAD mencapai Rp80,3 miliar atau 23,5 persen dari target. Baik secara persentase terhadap targetnya maupun secara nominal, realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Jika dilihat lebih rinci, Komponen PAD yang mencatatkan realisasi tertinggi secara nominal berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp60,9 miliar, sedangkan komponen dengan nominal realisasi terendah berasal dari Retribusi Daerah sebesar Rp4,9 miliar (jika tanpa membandingkan dengan komponen yang belum ada realisasi). Sementara Pajak Daerah selain mencatatkan nominal yang tertinggi juga mencatatkan tingkat persentase realisasi terhadap pagu yang tertinggi yaitu sebesar 12 persen. Adapun tingkat persentase realisasi terhadap pagu yang terendah dicatatkan oleh komponen Lain-lain PAD yang Sah yaitu hanya sebesar 4,2 persen dari target.

Grafik diatas menunjukkan komposisi PAD mengalami perubahan kontribusi dari Triwulan I tahun 2018 ke periode saat ini. Komponen Pajak Daerah mengalami penurunan kontribusi sedangkan Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah mengalami sebaliknya.

Pemerintah Daerah di wilayah Kalimantan Utara belum mampu merealisasikan target PAD dengan cukup optimal, hal ini ditandai dengan menurunnya rasio PAD terhadap total pendapatan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018.

a) Penerimaan Pajak Daerah

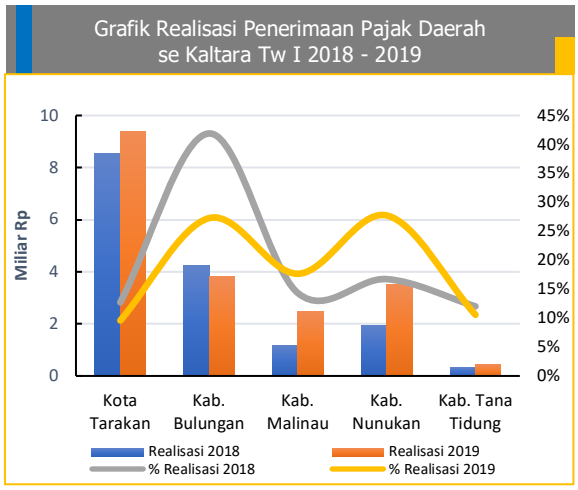

Sumber : BPKAD se-Kaltara (diolah)

Total Pajak Daerah yang terhimpun sampai dengan Triwulan I tahun 2019 mencapai sebesar Rp60,9 miliar atau 12 persen dari target. Sebesar Rp41,1 miliar atau 68 persen dari total realisasi pajak daerah bersumber dari Pemprov Kalimantan Utara. Namun secara persentase realisasi terhadap target, capaian tertinggi dicatatkan Kabupaten Nunukan sebesar 27,7 persen. Jika sumber pajak daerah tidak memperhitungkan penerimaan dari Pemprov Kalimantan Utara, maka daerah dengan penyumbang pajak daerah terbesar berasal dari Kota Tarakan.

b) Penerimaan Retribusi Daerah

Sampai dengan akhir bulan Maret 2019, realisasi di seluruh Pemerintah Daerah se Kalimantan Utara mencapai Rp4,9 miliar atau sebesar 9,4 persen dari target. Dari enam Pemerintah Daerah yang mencatatkan kenaikan nominal realisasi dibanding periode yang sama tahun lalu hanya dua Pemerintah Daerah yaitu, Pemprov Kalimantan Utara dan Kabupaten Nunukan. Sedangkan empat daerah lainnya mencatatkan penurunan nominal realisasi dibanding periode yang sama tahun lalu, dan yang paling drastis penurunannya adalah Kota Tarakan.

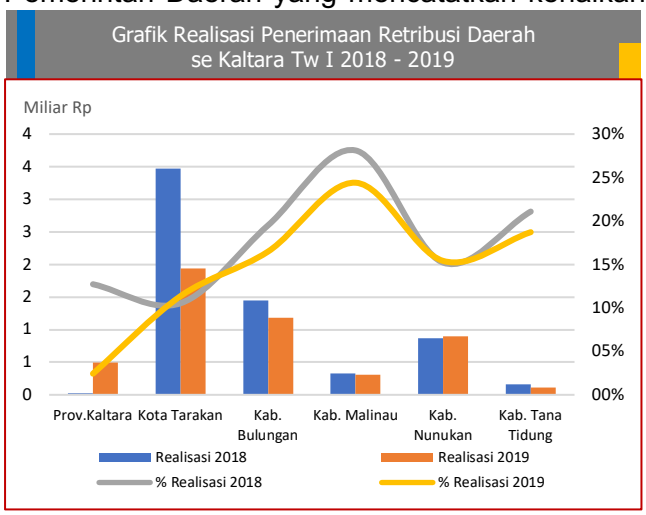

Sumber : BPKAD se-Kaltara (diolah)

Untuk nominal realisasi terbesar tercatat di wilayah Kota Tarakan sebesar Rp1,9 miliar. Hal ini sangat wajar karena sebagian besar aktifitas perekonomian yang dikenakan retribusi daerah berlokasi di wilayah perkotaan, dalam hal ini Kota Tarakan.

c) Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pada akhir Triwulan I 2019, seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Kaltara belum sama sekali mencatatkan realisasi penerimaan atas komponen ini, atau dengan kata lain 0 persen sama halnya dengan yang terjadi pada periode yang sama tahun lalu dan untuk Pemprov Kaltara pada tahun 2019 ini mulai mengalokasikan penerimaan pada komponen ini.

Data Pagu dan Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pemda se Kaltara Tw I 2018 - 2019

PEMDA	Pagu 2018	Realisasi 2018	Pagu 2019	Realisasi 2019
Prov.Kaltara	-	-	12.000.000.000	-
Kota Tarakan	13.000.000.000	-	6.500.000.000	-
Kab. Bulungan	16.800.000.000	-	21.800.000.000	-
Kab. Malinau	5.756.333.000	-	5.756.333.000	-
Kab. Nunukan	5.100.000.000	-	5.100.000.000	-
Kab. Tana Tidung	8.000.000.000	-	8.000.000.000	-

d) *Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah (LLPADYS)*

Grafik Realisasi LLPADYS se Kaltara Tw I 2018 - 2019

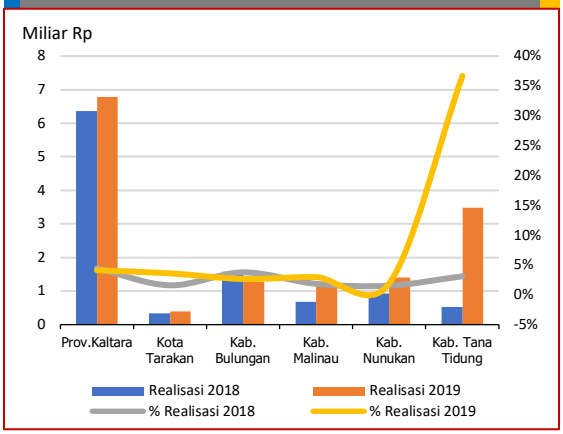

Sumber : BPKAD se-Kaltara (diolah)

Secara agregat, penerimaan LLPADYS regional Kalimantan Utara pada akhir periode pelaporan mencapai 4,2 persen dari target atau sebesar Rp14,5 miliar. Komponen PAD ini secara umum menunjukkan tren peningkatan hampir diseluruh pemda, kecuali Kabupaten Bulungan yang tercatat mengalami penurunan realisasi penerimaan.

Nominal realisasi pada Triwulan I 2019 di Kabupaten Tana Tidung mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan periode tahun lalu dengan persentase peningkatan yang mencapai 566,2 persen. Berbanding terbalik dengan pencapaian Kabupaten Bulungan yang mencatatkan penurunan nominal realisasi sebesar 19,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer mencapai 23,9 persen dari pagu atau sebesar Rp1,66 triliun. Capaian ini menunjukkan sedikit perbaikan jika dibandingkan tahun lalu yang mencapai 23,6 persen. Jika ditinjau per jenis Transfer, secara rata-rata terealisasi 12

persen, dimana jenis Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) mencatatkan tingkat realisasi tertinggi sebesar 24,3 persen

Sumber Pendapatan Transfer mayoritas berasal dari Transfer Pemerintah Pusat yang mencapai Rp1,64 triliun atau 98,7 persen sedangkan sisanya adalah Transfer/Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi.

Grafik Kontribusi TKDD Terhadap Total Pendapatan Daerah Prov. Kaltara Tw I 2018 - 2019

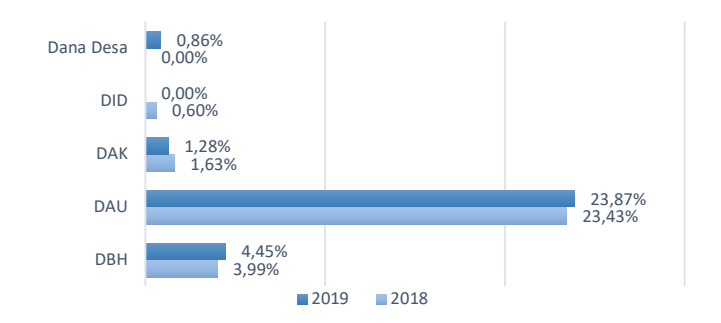

Sumber : BPKAD se-Kaltara (diolah)

Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, kontribusi realisasi Transfer Pemerintah Pusat terhadap total realisasi Pendapatan Daerah di regional ini menunjukkan ada peningkatan di semua jenis transfer kecuali DAK dan DID.

Grafik Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Tw I 2019

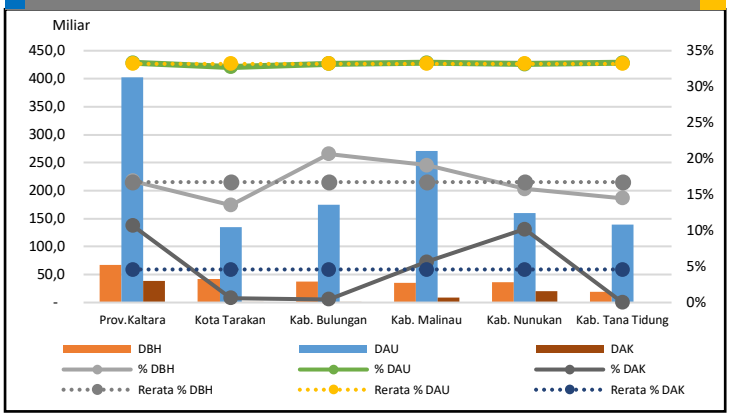

Sumber : BPKAD se-Kaltara (diolah)

Berdasarkan rincian jenisnya, rata-rata realisasi DBH mencapai 16,74 persen sedangkan DAU mencapai 33,17 persen dari target. Tingkat realisasi yang tidak ideal tercatat hanya pada jenis DAK yang baru mencapai 4,6 persen.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (LLPDYS)

Data Pagu LLPDYS Triwulan I 2018-2019

PEMDA	Pagu 2018	Realisasi 2018	% Realisasi 2018	Pagu 2019	Realisasi 2019	% Realisasi 2019
Prov.Kaltara	1.053.766.331	314.820.000	29,9%	43.211.636.851	161.060.000	0,4%
Kota Tarakan	30.569.680.000	-	0,0%	36.569.680.000	-	0,0%
Kab. Bulungan	1.935.000.000	667.103.979	34,5%	22.084.514.054	-	0,0%
Kab. Malinau	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Kab. Nunukan	4.500.000.000	-	0,0%	193.854.966.000	-	0,0%
Kab. Tana Tidung	2.724.395.760	467.079.700	17,1%	7.293.768.783	1.411.649.200	19,4%

Sumber : BPKAD se-Kaltara (diolah)

Pada triwulan I 2019, tingkat realisasi tertinggi dicapai Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp1,4 miliar atau 19,4 persen dari target. Pada posisi kedua, baik secara persentase maupun nominal tercatat di Pemprov Kaltara sebesar Rp161 juta atau 0,4 persen dari

target. Keseluruhan daerah tercatat menetapkan pagu target penerimaan cukup sgnifikan dibandingkan target tahun lalu.

B. Belanja Daerah

Persentase realisasi total belanja (tanpa transfer) seluruh Pemerintah Daerah di Kalimantan Utara tercatat menurun dari 8,8 persen di Triwulan I 2018 menjadi 8,35 persen di Triwulan I 2019.

Grafik Persentase Realisasi Belanja Per Pemda Triwulan I 2018 - 2019

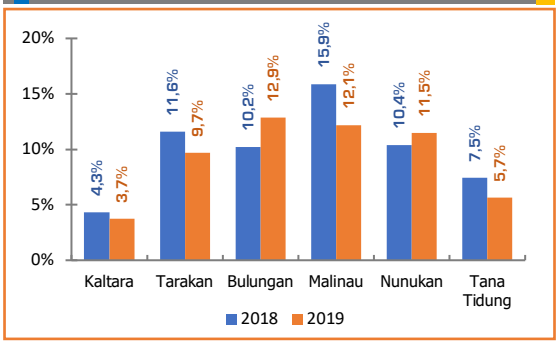

Grafik Persentase Realisasi Belanja Per Jenis Belanja Triwulan I 2018 - 2019

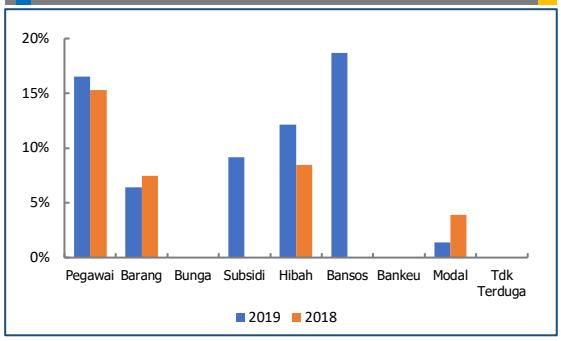

Sumber : BPKAD se-Kaltara (diolah)

Tingkat penyerapan tertinggi pada periode ini bersumber dari Belanja Bansos yang mencapai 18,7 persen dari pagu, disusul kemudian Belanja Pegawai sebesar 16,5 persen dan Belanja Hibah sebesar 12,1 persen. Tingkat penyerapan Belanja periode Triwulan I 2019 ini dari seluruh pos Belanja mengalami peningkatan jika dibanding dengan tahun lalu, kecuali untuk pos Belanja Modal dan Belanja Barang yang mengalami penurunan persentase penyerapan pada periode ini dibandingkan dengan periode Triwulan I 2018.

Mayoritas pemda, selain Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan, mengalami penurunan persentase realisasi belanja dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada periode pelaporan, kinerja realisasi belanja tertinggi tercatat pada Kabupaten Bulungan yang mencapai 12,9 persen. Sementara Pemprov Kalimantan Utara menjadi daerah dengan tingkat penyerapan belanja yang terendah sebesar 3,7 persen.

Realisasi Belanja secara keseluruhan yang belum optimal, sebagian besar dipengaruhi oleh rendahnya realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal dikarenakan sebagian besar kegiatan masih dalam proses awal pelelangan paket pekerjaan maupun pengadaan. Tentu hal ini bertolak belakang dengan tema HUT ke-6 provinsi termuda Indonesia pada tahun 2019 ini yaitu "*Inovatif, Transparansi, Kerja Cepat, Kerja Cerdas Untuk Kalimantan Utara Terdepan*".

C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun

Prognosis realisasi APBD disusun dengan mempertimbangkan perkembangan yang diperkirakan akan mempengaruhi realisasi anggaran. Pada sisi pendapatan, PAD diperkirakan mengikuti pola realisasi 2 tahun terakhir yang tercatat 90 persen dan 93 persen. Pendapatan Transfer diperkiraan tidak mengalami perubahan atau bahkan cenderung mengalami sedikit kenaikan seiring dengan kenaikan target penerimaan perpajakan dalam UU APBN 2019, maka DBH Pajak juga akan bertambah. Selain itu prediksi kenaikan harga dan permintaan komoditas batu bara yang menjadi salah satu komoditas utama diregional ini maka DBH SDA pun berpotensi mengalami peningkatan realisasi penerimaan. Di sisi belanja, capaian realisasi 78 persen di tahun 2017 dan 85 di tahun 2018 menjadi salah satu pertimbangan utama penyusunan prognosis realisasi sampai akhir tahun 2019 yang diperkirakan realisasi belanja akan meningkat namun tidak terlalu signifikan dari capaian tahun 2018. Dengan adanya beberapa program prioritas nasional untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di regional Kalimantan Utara namun melihat perkembangan realisasi sampai triwulan I 2019 masih stagnan belum ada progress.

Tabel Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Kalimantan Utara s.d. Triwulan IV 2019

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan I		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV	
		Miliar Rp	% Realisasi	Miliar Rp	% Realisasi
Pendapatan Daerah	8.193,8	1.739,4	21,2	7.702,1	94
Belanja Daerah	8.687,2	722,3	8,3	7.241,2	90,2
Surplus/Defisit	(493,4)	1.017,1	(206,1)	460,9	(93,4)

Sumber : BPKAD se Kaltara

IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

Tabel Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Kalimatan Utara Periode Triwulan I 2019

URAIAN	T.A. 2019				T.A. 2018
	Pusat (Miliar Rp)	Daerah (Miliar Rp)	Konsolidasian (Miliar Rp)	Kenaikan (%)	Konsolidasian (Miliar Rp)
PENDAPATAN NEGARA	595,96	1.717,44	676,43	-67.44%	2.077,72
Penerimaan Perpajakan	546,10	60,87	606,97	34.49%	451,31
Penerimaan Negara Bukan Pajak	49,86	1.656,56	69,46	-95.73%	1.626,41
BELANJA NEGARA	2.039,30	700,36	1.102,69	-0.42%	1.107,36
Belanja Pemerintah	402,33	665,76	1.068,09	1.14%	1.056,02
Transfer	1.636,97	34,60	34,60	-32.60%	51,34
SURPLUS (DEFISIT)	(1.443,34)	1.017,07	(426,26)	-143.93%	970,36
PEMBIAYAAN	-	20,00	20,00	-85.32%	136,28
Penerimaan Pembiayaan Daerah	-	-	-	-100.00%	136,28
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	20,00	20,00		-
SILPA/SIKPA	(1.443,34)	997,07	(446,26)	-140.33%	1.106,64

Sumber : LKPK Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara

Periode triwulan I 2019 menunjukkan realisasi Pendapatan Provinsi Kalimantan Utara Konsolidasian mengalami penurunan dari Rp2,077.72 miliar pada triwulan I 2018 menjadi Rp676.43 miliar. Pendapatan tersebut merupakan konsolidasi dari Pendapatan Pemerintah Pusat sebesar Rp595.96 Miliar dan Pendapatan Pemerintah Daerah konsolidasian sebesar Rp1,717.44 miliar. Realisasi Belanja Konsolidasian juga mengalami hal yang sama yaitu penurunan dari Rp1,107.36 miliar pada triwulan I 2018 menjadi Rp1,102.70 miliar di triwulan I 2019.

B. Pendapatan Konsolidasian

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Grafik Komposisi Pendapatan Konsolidasian Per Jenis Triwulan I Tahun 2018-2019 (Miliar Rp)

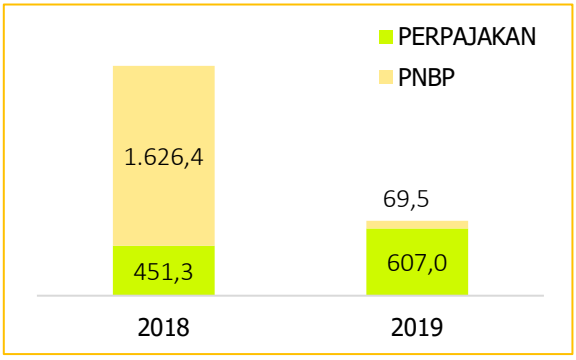

Sumber LKPK Kanwil DJPb Prov Kaltara

Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Kalimantan Utara pada akhir periode pelaporan mengalami perubahan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pendapatan Negara Bukan Pajak pada tahun sebelumnya menjadi kontributor terbesar dengan proporsi sebesar 78.2% di triwulan I 2018 tetapi pada triwulan I 2018 mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi hanya 10.27%. Terjadi penurunan ini disebabkan karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan pada

tahun 2019. Pada tahun 2018 Pendapatan Droping Dana Transfer diakui sebagai Pendapatan sedangkan pada tahun 2019 Pendapatan Droping Dana Transfer sudah tidak diakui sebagai pendapatan.

Grafik Komposisi Pendapatan Per Kewenangan Triwulan I 2019 (Miliar Rp)

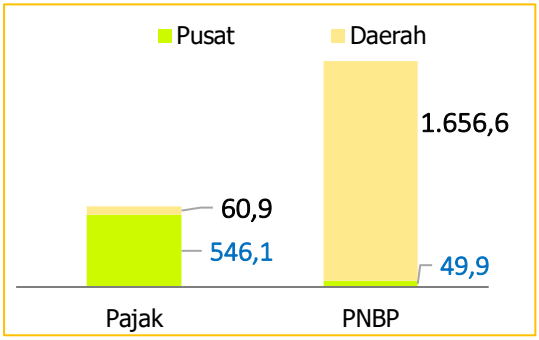

Sumber LKPK Kanwil DJPb Prov Kaltara

Pada periode laporan, 89.97% Penerimaan Perpajakan Konsolidasian atau setara dengan Rp546.1 miliar berasal dari Pemerintah Pusat sementara 10.03% atau sebesar Rp60.87 miliar sisanya merupakan kontribusi Pemerintah Daerah. Sementara untuk Realisasi PNBP Konsolidasian, sesuai dengan metode konsolidasian Government Financial Statistics pada tahun 2019 klasifikasi PNBP Pendapatan Transfer dan Pendapatan Dropping Dana Transfer tidak lagi diakui sebagai pendapatan konsolidasian. Hal ini menyebabkan terjadinya "penurunan" realisasi PNBP Pemerintah Pusat. Realisasi PNBP secara akumulatif sebesar Rp1.71 triliun yang sebagian besar merupakan kontribusi PNBP pemerintah daerah dengan proporsi persentase sebesar 98.08% atau senilai Rp1,656.6 miliar dan sisanya sebesar 2.92% atau senilai Rp49.86 miliar merupakan Pontribusi pemerintan Pusat.

2. Analisis Perubahan

Secara agregat Pendapatan Konsolidasian pada triwulan I 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan periode sebelumnya. Komponen Perpajakan mengalami kenaikan realisasi pada triwulan I 2019 sebesar 34.49% sedangkan komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 95.73%. Penurunan PNBP disebabkan adanya perubahan pengakuan Pendapatan Transfer dan Pendapatan Dropping Dana Transfer. Meningkatnya Pendapatan Perpajakan menunjukkan kondisi perekonomian yang terus bertumbuh di regional Kalimantan Utara.

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan

Tabel Realisasi Pendapatan Konsolidasian Triwulan I 2018-2019

URAIAN	TH 2018		TH 2019	
	(Miliar RP)	% ↑↓ yoy	(Miliar RP)	% ↑↓ yoy
PERPAJAKAN	451.31	140,4	606.97	34,5
PNBP	1,626.41	2,39	69.46	-95,7
TOTAL	2,077.72	16,9	676.43	-67,4
PDRB ADHK	14,063.96	5,56	14.077	7,13

Sumber LKPK Kanwil DJPb Prov Kaltara

Pertumbuhan ekonomi di Triwulan I 2019 (yoy) yang tercatat sebesar 7.13% mengalami peningkatan pertumbuhan dibandingkan kondisi di Triwulan I 2018 yang tumbuh sebesar 5.56%. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan pertumbuhan pada periode pelaporan tersebut ternyata berkorelasi negatif atau berbanding terbalik dengan realisasi pendapatan konsolidasian. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kebijakan akuntansi untuk pengakuan pendapatan. Pada tahun 2018 Pendapatan Droping Dana Transfer diakui sebagai Pendapatan sedangkan pada tahun 2019 Pendapatan Droping Dana Transfer sudah tidak diakui sebagai pendapatan. Hal ini memengaruhi pendapatan (PNBP) sebesar Rp1.64 triliun tidak diakui sebagai pendapatan 2019. Aktifitas dihampir seluruh sektor ekonomi atau lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan pada periode ini hal ini terlihat dari pertumbuhan pendapatan perpajakan. Meningkatnya penerimaan perpajakan tentunya berkontibusi terhadap kondisi positif realisasi pendapatan konsolidasian di regional Kalimantan Utara.

C. Belanja Konsolidasian

1. Analisis Proporsi Dan Perbandingan

Grafik Komposisi Belanja dan Transfer Konsolidasian Triwulan I 2018-2019 (Miliar Rp)

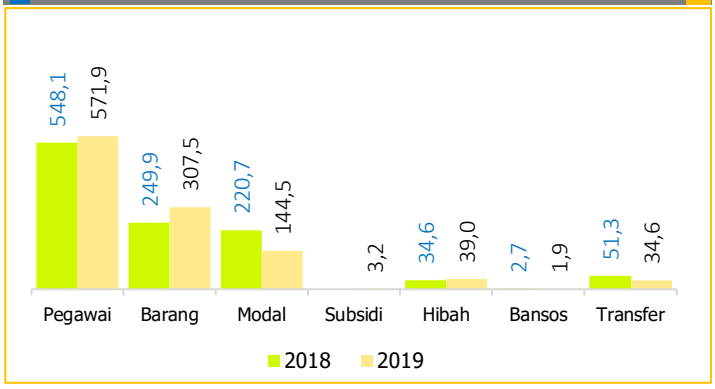

Sumber : LKPK Kanwil DJPb Prov Kaltara

Sebanyak 79,76% belanja pemerintah pada triwulan I tahun 2019 digunakan untuk belanja operasional, sementara dana yang digunakan untuk belanja modal hanya mencapai 13,10%. Hal ini tidak berbeda jauh dibandingkan periode yang sama di tahun yang lalu, saat sebagian besar dana pemerintah digunakan untuk belanja operasional mencapai 72,06%.

2. Analisis Perubahan

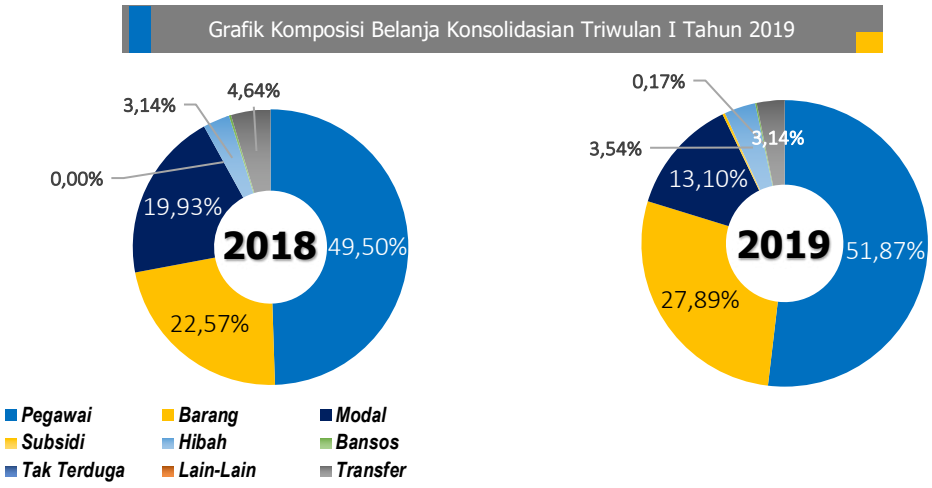

Sumber LKPK Kanwil DJPb Prov Kaltara

Realisasi belanja pada triwulan I tahun 2019 masih didominasi oleh Belanja Pegawai yang mencapai 51.87%. Angka ini sedikit lebih besar dibandingkan dengan triwulan I tahun 2018 yang hanya mencapai 49.50% serta secara nominal terjadi peningkatan sebesar Rp23.8 miliar. Peningkatan ini juga terjadi pada persentase realisasi Belanja Barang. Realisasi belanja barang naik dari semula 22.57% menjadi 27.89%, sementara belanja modal mengalami penurunan dari 19,3% menjadi 13.10%.

3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Kepada Indikator Ekonomi Regional

Kebijakan fiskal dalam bentuk APBN dan APBD yang dijalankan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sampai dengan triwulan I 2019 secara relatif cukup memberikan pengaruh signifikan terhadap pembentukan PDRB terutama pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Di wilayah Kalimantan Utara sejumlah proyek pembangunan infrastruktur ditetapkan sebagai proyek strategis nasional turut memberikan andil yang cukup besar terhadap pertumbuhan komponen ini tetapi pertumbuhan PMTB pada Triwulan I tahun 2019 mengalami pertumbuhan yang melambat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Faktor pertumbuhan yang melambat ini salah satunya ialah terjadinya penurunan pembangunan infrastruktur. Hal ini tercemin dari besaran belanja modal pada triwulan I 2018 sebesar Rp220,7 miliar dan mengalami penurunan menjadi Rp144,5 miliar pada triwulan I 2019. Penurunan belanja modal pemerintah Penurunan ini tidak saja pada besaran rupiah tetapi juga besaran komposisinya terhadap belanja secara keseluruhan. Faktor lainnya ialah belanja

modal pemerintah yang pada triwulan I masih memasuki tahap tender sehingga proyek yang berjalan masih belum maksimal/menahan pertumbuhan disektor ini.

Sementara pengaruh kebijakan fiskal pemerintah terhadap komponen Pengeluaran Pemerintah dalam struktur PDRB sisi pengeluaran, masih relatif kecil mengingat komponen ini hanya berkontribusi sebesar 5,01%. Hal ini berbanding lurus dengan laju pertumbuhan komponen Pengeluaran Pemerintah pada periode triwulan I 2019 sebesar 6,30% tercatat sebagai paling rendah kedua dibawah Pembentukan Modal Tetap Bruto.

Kebijakan fiskal dalam pengertian luas, yang termasuk kemudahan investasi, pemberian berbagai jenis insentif perpajakan, pengurangan/pembebasan bea masuk dan atau bea keluar, diakui punya pengaruh terhadap pertumbuhan pada komponen Ekspor Barang dan Jasa, yang tumbuh 11.20% (yoy). Komponen Ekspor Barang dan Jasa merupakan distributor terbesar terhadap PDRB menurut pengeluaran dengan besaran Rp14.228,22 miliar bahkan Komponen Ekspor Barang dan Jasa (bruto) setara dengan 96,44% total PDRB. Batubara masih merupakan komoditas penyumbang terbesar komponen ekpor barang dan jasa, kemudian dikuti oleh hasil laut (udang) dan kayu.

D. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada triwulan I tahun 2019, Belanja pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mencapai Rp1.003,95 miliar, sementara itu investasi pemerintah senilai Rp140,33 miliar. Sementara itu PDRB Provinsi Kalimantan Utara pada triwulan I tahun 2019 atas dasar harga berlaku sebesar Rp23,16 trilliun.

Dengan demikian, kontribusi pemerintah terhadap PDRB dari belanja pemerintah adalah sebesar 4,85%, naik dari periode yang sama tahun sebelumnya sedangkan kontribusi dari investasi pemerintah yang tercatat sebesar 0.68% mengalami penurunan dibandingkan periode triwulan I 2018. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa belanja pemerintah mempunyai kontribusi yang lebih besar daripada investasi pemerintah.

Tabel Kontribusi Pemerintah Terhadap PDRB ADHB Triwulan I 2018-2019

KOMPONEN PDRB	2018		2019	
	Nominal (Miliar Rp)	% Kontribusi	Nominal (Miliar Rp)	% Kontribusi
BELANJA (G)	885,9	4,27	1.003,95	4,85
INVESTASI (I)	220,7	1,06	140,33	0,68
PDRB	20.739,76		23.161,92	

Sumber LKPK Kanwil DJPb Prov Kaltara

V. BERITA/ISU FISKAL TERPILIH

Dampak Kebijakan DMO Batubara Terhadap Ekonomi Kaltara

Kalimantan Utara merupakan provinsi paling muda di wilayah NKRI. Provinsi ini merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur. Seperti lazimnya provinsi di Pulau Kalimantan kegiatan disektor pertambangan dan penggalian merupakan penyumbang terbesar perekonomian, begitu pula dengan Provinsi Kalimantan Utara.

Terjadinya penurunan kuota di sejumlah daerah termasuk di Kalimantan Utara dikhawatirkan akan memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian. Apalagi Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi baru yang sedang membutuhkan segala sumber daya dan inovasi untuk meningkatkan pembangunan agar bisa sejajar dan bersaing dengan daerah yang lain. Dampak akibat pengurangan kuota ini dapat melemahkan perekonomian daerah. Hal ini disebabkan karena dengan pengurangan kuota akan memberikan efek langsung kepada jumlah royalti yang dibayarkan kepada pemda akan berkurang dan juga potensi terjadinya pengurangan pegawai/karyawan dikarenakan PHK oleh perusahan pertambangan (batubara).

Dengan berkurangnya royalti batubara dan terjadinya PHK tentu akan memberikan multiplier effect terhadap perekonomian daerah. Berkurangnya pendapatan pemerintah dari sektor pertambangan ini tentu akan mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan stimulus perekonomian dalam meningkatkan pertumbuhan ekomoni daerah. Selain itu, terjadi PHK karyawan akan memberikan dampak langsung terhadap sektor perekonomian yang lain yang terkait, seperti sektor transportasi dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum.

Selain terjadinya pengurangan kuota, kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pemanfaatan batubara dalam negeri atau *Domestic Market Obligation* (DMO) yang diberlakukan pada tahun 2019 dikhawatirkan juga akan memengaruhi pertumbuhan perekonomian di Kalimantan Utara. Kebijakan ini juga akan mengena langsung terhadap sektor pertambangan di Kalimantan Utara. Hal ini dikarenakan kondisi batubara yang di produksi di Kalimantan Utara memiliki kualitas yang kurang dan tidak memenuhi kebutuhan PLN sehingga tidak layak untuk DMO. Terkait dengan kebijakan DMO ini diharapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan pengecualian untuk Kalimantan Utara untuk tidak memenuhi kewajiban DMO selain itu juga adanya transparansi pelaksanaan DMO.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
JALAN SUTOYO NOMOR 1, TANJUNG SELOR, KALIMANTAN UTARA 77211
TELEPON: 0552-2034598 EMAIL: kanwildjpb.kaltara@kemenkeu.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-202/WPB.21/2019

Yth.	:	Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran
Dari	:	Kepala Kantor Wilayah
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	Satu berkas
Hal	:	Penyampaian Kajian Fiskal Regional Triwulan I Tahun 2019
Tanggal	:	13 Mei 2019

Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-61/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional, bersama ini kami sampaikan Kajian Fiskal Regional triwulan I tahun 2019 Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana terlampir. *Softcopy* laporan tersebut telah disampaikan melalui alamat *email* ditpa@kemenkeu.go.id dan ditembuskan (cc) ke lo.ditpa@gmail.com.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Kantor,

m Midden Sihombing